



Analisis Perubahan Karakteristik Desa Bandar Klippa – Percut Sei Tuan – Deli Serdang Tahun 2005-2010

Vivi Kumala Sari dan Nahor Simanungkalit*

Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1). Perubahan bentuk penggunaan lahan yang dilihat dari jenis, luas, dan perubahan yang paling dominan yang terjadi, 2). penambahan sarana dan prasarana akibat dari perubahan bentuk penggunaan lahan 3). Aktifitas penduduk akibat dari bentuk perubahan penggunaan lahan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2010. Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh masyarakat yang berjumlah 8.736 jiwa dan 2.347 KK. Teknik pengumpulan data menggunakan Tehnik Dokumenter, Tehnik Observasi Langsung, dan Komunikasi Langsung. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Perubahan karakteristik desa terkait perubahan lahan yang paling dominan adalah pemukiman dan persawahan, 2). Dilihat dari Sarana dan Prasarana yang berkembang dan cukup lengkap dengan memiliki Gedung Pemerintahan Desa; Gedung Sekolah, Gedung Peribadatan (Masjid/Mussholah/Gereja/Vihara), Gedung Kesehatan (RS/Klinik/Apotik/Posyandu), 3). Dilihat dari aktivitas masyarakat akibat perubahan bentuk penggunaan lahan Desa Bandar Klippa sudah mengalami banyak perkembangan yang mengarah kepada arah positif dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, adat istiadat.

Kata Kunci: Analisis; Perubahan; Karakteristik.

Abstract

The study aims to determine: 1). Changes in land use seen form of the type, area, and the most dominant changes that occurred, 2). accretion of facilities and infrastructure resulting from changes in land use form 3). People activity resulting from land-use change shape in Desa Bandar Klippa Percut District of Sei Tuan in Deli Serdang District Year 2005-2010. Population and sample in this research is the whole community that numbered 8736 inhabitants and 2,347 households. The data collection technique using documentary techniques, Direct Observation Techniques, and Direct Communication. Technical analysis of the data used is qualitative descriptive analysis. The results showed that: 1). Changes related to changes in the characteristics of the village is the most dominant land settlement and rice fields, 2). Judging from the growing Infrastructures and complete enough to have the Village Government Buildings ;. School Building, House of Worship (Masjid / Mussholah / church / monastery), Building Health (Hospital / Clinics / Pharmacies / IHC), 3). Judging from community activities due to changes in land use form Bandar Klippa village has undergone many developments that led to the positive direction seen from the level of education, health, customs.

Keywords: Analysis; Change; Characteristics.

How to Cite: Sari, V.K. dan Nahor S., (2013). Analisis Perubahan Karakteristik Desa Bandar Klippa–Percut Sei Tuan–Deli Serdang Tahun 2005-2010, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 37-53.

*Corresponding author:

E-mail: nahorsimanungkalit@gmailcom

p-ISSN: 2549 1660

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan dan keseimbangan antara keduanya yaitu pembangunan itu merata di seluruh tanah air dan bukan hanya untuk golongan atau sebahagian dari masyarakat saja, tetapi untuk masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai kebaikan hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadikan tujuan dan cita-cita kemerdekaan dari negara Indonesia.

Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Jumlah desa di Indonesia mencapai sekitar 65.000 buah (Rahardjo Adisasmita, 2006). Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (*agriculture base*). Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Peningkatan pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah pedesaan. Kesenjangan pertumbuhan antar desa (pedesaan) diupayakan makin menurun sehingga makin mantap terwujudnya pembangunan pedesaan. Namun sampai sekarang masih

terdapat ketimpangan dalam pembangunan di Indonesia. Seperti:

(1) Ketimpangan produktifitas antara pertanian dan industri manufaktur dan jasa,

(2) Ketimpangan pendapat antara wilayah perkotaan dan pedesaan,

(3) Ketimpangan antara kelompok masyarakat tertentu dan rakyat secara keseluruhan (Arif,

dalam Sugiharto, 2006).

Masalah perkembangan pada suatu desa ditandai dengan adanya perbedaan berbagai karakteristik serta gejala lain di sekitar wilayah tersebut. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal : kependudukan, pendidikan, pekerjaan, penggunaan lahan serta sarana dan prasarana yang akan melengkapi kehidupan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas didalamnya.

Untuk meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan dilakukan berbagai program pembangunan, perencanaan dan implementasinya tetapi dimaklumi bahwa ternyata masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang serta dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten (Peraturan Menteri PU No.16/PRT/M/2009 dan PP No. 15/2010. Maka wilayah Kabupaten dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah pedesaan tersebut.

Arahan tersebut merupakan keseluruhan pembangunan di daerah pedesaan seharusnya mencakup aspek spasial (tata ruang). Aspek spasial pedesaan akan memberikan dasar bagi pencapaian keserasian dan optimasi dalam pemanfaatan ruang pedesaan sesuai fungsi masing-masing desa mengikuti strategi pengembangan pola tata ruang kabupaten. Berpegang pada tata ruang kabupaten, maka diharapkan kegiatan pada masing-masing desa dapat mewujudkan

perkembangan desa yang saling melengkapi dan saling menunjang.

Pada tingkat makro, penataan ruang pedesaan diarahkan untuk mengatur pemanfaatan lahan dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendukung terwujudnya keserasian perkembangan sistem permukiman dan pusat-pusat pelayanan (pertumbuhan) di tingkat desa.

Pada tingkat mikro, penataan ruang pedesaan ditujukan kepada upaya untuk menciptakan kontribusi sumber daya lahan secara optimal terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat, yang umumnya terdiri dari keluarga petani yang memiliki lahan sempit dan miskin serta mempunyai usaha berskala kecil dan lemah kedudukannya terhadap pemilihan faktor produksi dan jaringan pemasaran.

Demikian halnya dengan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dilihat dari letak wilayahnya desa Bandar Klippa merupakan wilayah hinterland kota Medan yang mengalami perubahan karakteristik desa (kekotaan) terutama pada perubahan bentuk penggunaan lahan dan aktifitas masyarakatnya. Perubahan bentuk penggunaan lahan ini berbeda-beda antara lokasi, perubahan-perubahan yang terjadi di Desa Bandar Klippa dapat dilihat dengan peningkatan pemukiman baru seperti pembangunan perumahan, perkantoran, tempat-tempat usaha seperti : pasar tradisional dan pasar modern maupun fasilitas lain yang mendesak lahan pertanian dari tahun ke tahun. Di tahun 2005 sendiri pembangunan yang terjadi pada wilayah Desa Bandar klippa sendiri berupa perbaikan pasar tradisional yaitu pasar gambir kemudian ditahun 2006 hingga 2007 pembangunan yang tampak jelas adalah perubahan lahan pertanian yang menjadi lahan pemukiman serta pemukiman yang berada di ruas jalan besar menjadi lahan perkantoran seperti perkantoran bank, tempat bimbingan, kantor show room kendaraan dan lain-lain demikian juga dengan pembangunan yang terjadi di tahun 2008-2009 tidak jauh

berbeda dengan tahun sebelumnya hanya saja di awal tahun 2009 pembangunan pasar modern mulai direncanakan dan pada pertengahan tahun 2009 pembangunan pasar modern mulai terlaksana begitu pula begitu pula untuk perbaikan jalan atau sarana transportasi hampir di setiap tahunnya tetap dilaksanakan guna memperlancar aktivitas masyarakat terkait perubahan aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan perubahan penggunaan lahan hingga diakhir tahun 2010. Dari perubahan yang terjadi akibat oleh pembangunan yang ada di wilayah tersebut merupakan perubahan yang ada pada pembangunan desa Bandar klippa merupakan perubahan yang mengarah pada pembangunan yang positif (Kepala Desa), namun selain mengarah pada arah yang positif tetap saja masih ditemui berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan karakteristik desa tersebut seperti berkurangnya lahan pertanian yang memaksa masyarakat untuk beralih mata pencarian, dampak lainnya berupa kurangnya layanan publik yang ada di wilayah Desa Bandar Klippa itu sendiri sehingga tidak jarang masih banyak ditemukan berbagai tindakan yang masyarakat yang kurang akan sadar hukum. Selain itu perubahan yang begitu cepat bagi para petani dalam menjalankan aktifitas masyarakat sehingga membuat masyarakat berpindah mata pencaharian yaitu berdagang, namun sangat disayangkan bahwa perdagangan yang ada di wilayah Bandar klippa masih berupa bentuk perdagangan kaki lima sedangkan pada wilayah tersebut sudah dibangun tempat perbelanjaan yang telah sesuai hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya peran serta pemerintah setempat dalam menindak secara tegas. Selain itu Wilayah Bandar Klippa tidak jarang menjadi wilayah yang tidak terlepas dari tingkat kemacetan yang tinggi hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pembelian kendaraan dan kurangnya pelayanan public untuk kelancaran transportasi. Perkembangan ilmu teknologi sendiri juga

cukup meresahkan warga hal ini disebabkan oleh banyaknya anak-anak yang masih berada pada usia pelajar memanfaatkan kemajuan teknologi lebih untuk bermain game online bukan untuk mencari bahan-bahan pembelajaran. Oleh karena itu perlu dipelajari perubahan penggunaan lahan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sejak Tahun 2005 - 2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana lokasi ini dipilih karena daerah tersebut merupakan daerah yang mengalami perkembangan yang lebih pesat di bandingkan dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Tembung Namun masih kurang tertata dengan baik. Selain itu yang menjadi alasan bagi penulis dalam memilih lokasi penelitian tersebut adalah: 1) Mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh perubahan bentuk penggunaan lahan di desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; 2) Mengetahui bagaimana perubahan pola hidup masyarakat yang terjadi setelah dan sebelum terjadinya perubahan penggunaan lahan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dengan jumlah penduduk sebesar 8.736 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.347 KK. Hal ini disebabkan oleh pengambilan data secara sekunder.

Sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh wilayah yang ada di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. dengan pengambilan sampel terhitung 5 % dari jumlah kepala keluarga 2.347 KK di setiap dusunnya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Perubahan bentuk lahan; 2) Pertambahan Sarana Dan

Prasarana akibat dari perubahan penggunaan lahan; 3) Aktivitas penduduk akibat dari perubahan bentuk penggunaan lahan.

Guna persamaan persepsi terhadap masalah dan variabel penelitian maka penulis mencoba membahas definisi yang digunakan yaitu: 1) Perubahan penggunaan lahan, perubahan yang terjadi pada setiap penggunaan lahan di tahun 2005-2010 yang dilakukan penduduk dengan maksud lebih mengintensifkan lahan untuk kepentingan sosial dan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lahan adalah suatu wilayah yang dikelola oleh rakyat yang ditanami dengan berbagai macam tanaman yang termasuk didalamnya perkebunan, sawah irigasi, pertanian lahan kering (semi dan hortikultura).

Pemukiman adalah suatu lokasi tempat manusia baik perindividual, berkelompok, maupun berbagai ras menetap maupun berpindah-pindah sebagai tempat berteduh atau berlindung setelah mereka selesai melaksanakan aktivitasnya. Sarana dan prasarana adalah jalan raya, jembatan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, lahan ibadah.

Lahan hutan adalah asosiasi tumbuh-tumbuhan dimana pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lainnya secara dominan mendapat wilayah yang luas dan keberadaannya cukup rapat sehingga mampu menciptakan iklim yang berbeda dengan yang lainnya.

Aktivitas penduduk adalah kesibukan, kegiatan kerja yang dilaksanakan di setiap bagian lahan dalam suatu kegiatan pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan di sektor formal setelah perubahan bentuk penggunaan lahan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Teknik dokumenter digunakan untuk menjangkau dokumentasi data tentang perkembangan yang terjadi di Desa Bandar Klippa

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di Tahun 2005-2010, dengan menggunakan daftar dokumentasi; 2) Teknik observasi langsung yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi penggunaan lahan di Desa Bandar Klippa; 3) Teknik komunikasi langsung dengan cara mengambil data secara langsung terhadap penduduk setempat, berdasarkan alat pedoman wawancara dan daftar wawancara.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengelola data yaitu : analisis deskriptif kualitatif. Dimana pengelolaan data dilakukan dengan proses mengatur, mengurutkan data yang terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut diatur dan diurutkan, ditabulasi sesuai dengan kebutuhan peneliti, sehingga informasi kualitatif disusun atas pikiran, intuisi, pendapat, dan kriteria tertentu. Dengan melakukan proses analisis tersebut, maka data yang diperoleh akan memberi gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian yang kemudian akan memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti sehingga data tersebut dapat dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartodikusuma, mengemukakan sebagai berikut: Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.

Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Sedangkan menurut Paul H. Landis : Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa; 2) Ada

pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan; 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi oleh alam, seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Sedangkan menurut Kartohadikusumo (1953;2) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan aktifitas masyarakat yaitu : (1) desa agraris, (2) desa industri, (3) desa nelayan.

Pada masa sekarang ini telah menjadi suatu kenyataan yang di rasakan, dilihat dan dimaklumi oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa sebagian besar program-program pembangunan baik di bidang sektoral maupun regional dalam pelaksanaannya berada di wilayah pedesaan, sekurang-kurangnya berkaitan dengan desa-desa baik sumber tenaga kerjanya maupun tanah-tanah yang di gunakan dalam proyek-proyek pembangunan itu.

Tingkat perkembangan desa di setiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan potensi dan karakteristik desa tersebut baik fisik maupun non fisik. Sehubungan dengan itu maka ada pengklasifikasian atau pengelompokan desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11/1972 (Sumpeno, 2004) tentang pelaksanaan klasifikasi dan tipologi desa di Indonesia, desa di golongan menjadi tiga tingkatan yaitu: 1) Desa Swadaya, Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat – istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat bergantung pada alam. Secara umum desa swadaya sebagai berikut: a) Lebih dari 50 % penduduk bermata pencaharian disektor primer (berburu,menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional). b)

Produksi desa sangat rendah dibawah 50 juta rupiah pertahun. c) Adat istiadat masih mengikat kuat. d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30 % yang lulus sekolah dasar. e) Prasarana masih sangat kurang. f) Kelembagaan formal maupun informal kurang berfungsi dengan baik. g) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu instruksi dari atas.

2) Desa Swakarya, merupakan desa yang mengalami perkembangan yang lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik dan lebih maju, penduduk di desa ini mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Ciri-ciri desa ini sebagai berikut: a) Mata pencaharian penduduk sebahagian besar pada sektor jasa dan perdagangan atau lebih dari 55% penduduk bekerja disektor tertier. B) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha di atas 100 juta rupiah pertahun; c) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebahagian masyarakat menggunakannya. d) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai fungsinya dan telah ada 7-9 lembaga yang hidup. E) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD, sekolah lanjutan dan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi. f) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik. G) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

3) Desa Swasembada, merupakan desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi secara optimal. Adapun ciri-ciri desa swasembada adalah: a) Hubungan antar manusia bersifat rasional; b) Mata pencaharian penduduk sebahagian besar di bidang jasa dan perdagangan. c) Teknologi dan pendidikan tinggi, d) Produktifitas tinggi, e) Terlepas dari adat, f) Sarana dan prasarana lengkap dan modern

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh direktorat jendral

pembangunan masyarakat daerah (P.M.D.) departemen dalam negeri tahun 1973 (suhardjo,1984 dalam risbe, 2010) ada 10 unsur yang menjadi indikator dalam menetapkan kondisi perkembangan suatu desa melalui pendekatan (*Approach*) dan growth centre serta potensi perkembangan yaitu: 1) Unsur Penduduk (D), 2) Unsur Alam (N), 3), 4) Unsur Orbitasi Desa (O), 5) Unsur Ekonomi, Dalam Arti Mata Pencaharian (E), 6) Unsur Output desa atau yeld (Y), 7) Unsur Social budaya, agama dan adat (A), 8) Unsur pendidikan dan keterampilan (Pd), 9) Unsur kelembagaan dan kepemimpinan (L), 10) Unsur swadaya gotong royong (GR), 11) Unsur prasarana (P)

Dalam buku sosiologi karangan Ruman Sumadilaga, seorang ahli Sosiologi "Talcot Parsons" menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut:

Afektifitas, ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.

Orientasi kolektif, sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.

Partikularisme, pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungan dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. (lawannya Universalisme).

Askripsi, yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.

Kekabaran (diffuseness), sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

Lahan sebagai sumber daya sekaligus sebagai tempat manusia untuk melangsungkan hajat hidupnya dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sehubungan dengan hal ini Bintarto (1982) mengemukakan : lahan dipandang sebagai tempat wadah dari benda-benda atau perilaku dianggap sebagai tempat dan dapat digunakan untuk melaksanakan usaha, serta merupakan suatu yang dapat diatur dan dimanfaatkan oleh dan untuk manusia.

Lahan merupakan bagian kehidupan manusia untuk melaksanakan pertanian secara umum, sebagai tempat bermukim dan sebagainya. Kemungkinan yang diberikan lahan pada manusia diperoleh melalui segala usaha-usahanya untuk mengolah dan menggunakan tanah sesuai dengan keperluannya.

Segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia hubungannya dengan perilakunya dengan lahan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Dari berbagai daerah bentuk penggunaan lahan di suatu daerah sebenarnya sudah dapat diperkirakan keadaan sosial ekonomi daerah tersebut.

Jayadinta (1992), berpendapat bahwa lahan adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Simon dalam patiroy, (1998) mengatakan bahwa lahan merupakan permukaan tanah yang kontiniu menutupi kerak bumi kecuali di tempat berlereng terjal, di puncak-puncak pegunungan dan di daerah salju abadi. Lahan adalah unsur muka bumi yang penting bagi kehidupan manusia.

Penggunaan lahan merupakan proses adaptasi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Penggunaan

lahan pada umumnya digunakan untuk memacu pemanfaatan lahan, karena disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat dinamis. Penggunaan lahan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Manusia mengolah lahan untuk memperoleh hasil seoptimal mungkin dan dilain pihak lahan itu semakin memerlukan pengamatan dari manusia agar kelestariannya terjaga.

Menurut Sandy (1987), mengemukakan bahwa: Penggunaan lahan pada umumnya tidak lain adalah keseluruhan kehidupan masyarakat dalam ruang, dimana dengan memperhatikan penggunaan-penggunaan lahan di suatu tempat atau daerah yang akan diperkirakan tingkat kehidupan sosial, ekonomi dan tingkat sosial masyarakat tersebut. Umpamanya tingkat kebudayaan dan kaya miskinnya masyarakat dapat tercermin di dalam penggunaan lahan. Hal ini berarti ada interaksi antara aktivitas manusia terhadap lahan secara tidak langsung dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Malingerau (1978) mengatakan bahwa penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen maupun siklus terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan secara kebendaan maupun spiritual.

Menurut Hardoyo (2002) penggunaan lahan merupakan interaksi manusia dalam memanfaatkan lingkungan alamnya untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam kehidupan dan keberhasilannya. Undang-Undang Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 menjelaskan bahwa penggunaan lahan sebagai bentuk pemberdayaan hutan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dan nilai yang baik.

Penggunaan lahan dapat dibedakan atas pemukiman, perdagangan, pertanian, industri, transportasi, jasa, saluran irigasi dan lain sebagainya. Dalam perubahan

bentuk penggunaan lahan berkaitan dengan pengurangan luas pada bentuk yang sudah ada sebelumnya serta penambahan pada bentuk penggunaan lahan yang baru. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh pertambahan dan perubahan kepemilikan lahan yang dapat membawa implikasi terhadap perubahan kehidupan masyarakat (Hardoyo,2002).

Dalam memanfaatkan lahan. Sandy (1987) mengemukakan bahwa : Manusia memanfaatkan lahan yang selalu memulai lahan yang memiliki fisik yang baik, setelah lahan yang bersifat baik itu habis maka manusia akan menggunakan lahan yang kurang baik. Semakin cepat perkembangan jumlah manusia maka akan semakin cepat pula lahan sebagai sumberdaya yang tersedia akan habis dan akan terancam keseimbangan ekologisnya.

Vink (Hardoyo,2002) mengatakan bahwa lahan semakin terbatas disuatu pihak pendorong ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan kondisi biofisik lahan dan peruntukannya dilain pihak mendorong terjadinya penggunaan lahan secara intensif yaitu dengan cara intensifikasi penggunaan lahan. Oleh sebab itu penggunaan lahan harus dilakukan secara matang dan terarah agar dapat memberikan manfaat optimal dan berguna bagi kehidupan.

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen maupun siklus terhadap kumpulan sumberdaya buatan secara keseluruhan dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan baik kebendaan atau spiritual atau kedua-duanya. Menurut Barlouve (dalam Tumiur. S, 1999) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor instansi (kelembagaan).

Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dan sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, binatang dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Sedangkan faktor institusi

dicirikan oleh hukum pertahanan yang berlaku di masyarakat, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan hal ini menandakan bahwa pemanfaatan lahan merupakan cerminan hasil saling mempengaruhi sesuai dengan tempat dan waktu (Susanto, 1979).

Selanjutnya Silalahi (1997) mengemukakan bentuk-bentuk penggunaan lahan sebagai beriku: 1) Permukiman atau perkampungan adalah wilayah yang meliputi seluruh tempat yang termasuk didalamnya seperti kampung, desa di perkebunan yang diperuntukkan bagi karyawan perkebunan.

Persawahan meliputi (1) persawahan yang ditanam dengan padi satu kali dalam setahun karena mempunyai irigasi teknis yang baik dan dapat berupa rawa, sawah tadah hujan dan dapat pula ditanami dengan palawija setelah padi ditanam. (2) Persawahan yang ditanam dengan padi yang dapat dipanen dua kali setahun karena mempunyai irigasi teknis memadai.

Perkebunan besar adalah wilayah yang ditanami dengan jenis tanaman komoditi perkebunan seperti karet, kelapa sawit, teh, tembakau, kopi, coklat dan sebagainya.

Perkebunan rakyat adalah wilayah yang ditanami dengan jenis tanaman komoditi seperti yang terdapat pada perkebunan besar yang dilakukan oleh rakyat dan terkadang ditanami dengan jenis tanaman lain sebagai tanaman selingan namun yang menjadi tanaman utama adalah tanaman perkebunan.

Pertanian lahan kering adalah suatu wilayah pertanian yang dilakukan di wilayah kering yang ditanami oleh rakyat dengan (1) sayur-sayuran yaitu dengan pertanian yang dilakukan dilahan kering yang ditanami dengan jenis tanaman lain seperti jagung, padi setelah tanaman pokok sayuran dipanen.(2) campuran adalah kegiatan pertanian yang dilakukan dilahan kering yang ditanami dengan jenis tanaman pokoknya sudah tidak dapat dikenali dengan pasti dan biasanya

pertanian sejenis ini kerap kali dekat dengan perkampungan.

Hutan adalah wilayah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang meliputi (1) hutan lebat adalah suatu hutan yang tutupan dedaunannya menghalangi masuknya sinar matahari dan sukar dilalui manusia karena tumbuhannya rapat. (2) hutan belukar adalah hutan yang pepohonan besar mempunyai tinggi 9 meter dan sudah dapat dilakukan penebangan secara pilih dan hanya tinggal 10% saja dan luas penutup lahan matahari sudah banyak menembus dedaunan. (3) hutan semak belukar adalah suatu jenis hutan yang tersusun dari kebanyakan kayu anakan dengan tinggi pepohonan berkisar 3-7 meter (4) hutan sejenis merupakan wilayah hutan alam buatan yang merupakan hutan tumbuhnya sejenis hutan renata tinggi pepohonannya 7 meter (5) hutan rawa merupakan wilayah hutan yang tumbuhan penutup lahan berupa tumbuhan air dan umumnya didaerah pantai.

Rawa adalah tumbuhan danau yang merupakan sekumpulan air yang tergenang dan cukup luas serta tidak ada tumbuhan yang tinggi kecuali tumbuhan air.

Alang-alang dan padang penggembalaan merupakan lahan yang ditutupi alang-alang dan dapat disebut lahan kritis karena rendah sekali nilai gunanya. Perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan pengurangan luas pada bentuk sebelumnya, serta penambahan bentuk penggunaan lahan yang baru. Perubahan penggunaan lahan ini terutama disebabkan oleh penambahan penduduk dan perubahan kepemilikan tersebut (Hardoyo, 1999).

Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan luas penggunaan lahan atau telah beralih fungsi dari suatu bentuk penggunaan lahan tertentu ke bentuk penggunaan lahan lainnya selama periode tertentu. Perubahan bentuk penggunaan lahan adalah perubahan yang terjadi pada setiap bentuk penggunaan lahan yang

dilakukan oleh manusia sebagai penduduk dan masyarakat maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bila ditinjau kembali dampak yang ditimbulkan oleh penyempitan lahan pertanian sebagai akibat adanya pembangunan-pembangunan proyek tertentu baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kebijakan untuk perluasan tata ruang kota, jalan raya maupun permukiman penduduk setempat.

Murchrcke (1990) dalam Suryanto (2002) mengemukakan bahwa kenampakan penggunaan lahan yang selalu berubah atau sisi ruang penggunaan lahan yang selalu berubah sesuai dengan waktu. Kedua perubahan ini mempunyai tingkat perubahan dan berbagi variasi tingkat perubahan penggunaan lahan yang nantinya akan menghasilkan suatu pola perubahan penggunaan lahan tertentu.

Lebih jelasnya Murchrcke mengemukakan bahwa perubahan alih fungsi penggunaan lahan dapat terjadi baik secara sistematis dan non sistematis, berikut ini: 1) Perubahan sistematis ini terjadi oleh kenyataan yang terulang, yakni penggunaan lahan pada lokasi yang sama. Kecenderungan ini dapat dipetakan berdasarkan seri waktu. Fenomena yang ada harus dapat dipetakan berdasarkan sei waktu sehingga kondisi penggunaan lahan dapat diketahui. 2) Perubahan non sistematis ini disebabkan oleh kemampuan luas lahan yang mungkin bertambah, berkurang, maupun tetap. Luas dan bentuk lahan sangat mempengaruhi proses alih fungsi lahan maupun kegiatan yang ada di atasnya. Segala contoh lahan yang terletak di daerah dataran akan berbeda dengan di daerah yang bertopografi kasar, lahan yang memiliki stabilitas yang lemah. Peraturan-peraturan yang ada khususnya yang berkaitan dengan fungsi pemanfaatan lahan sangat mempengaruhi perkembangan daerah yang bersangkutan.

Peraturan mendirikan bangunan yang ketat dapat menjadi pemacu namun dapat pula menjadi penghambat laju alih fungsi lahan. Untuk daerah yang

diperuntukkan sudah jelas dan diijinkan maka laju alih fungsi lahan yang mengarah ke bentuk-bentuk yang dimaksudkan akan lebih menjadi lebih lancar. Sebaliknya pada lahan yang terkena peraturan tidak boleh mendirikan bangunan maka proses alih fungsi pemanfaatan lahan akan sangat terhambat bahkan tidak ada sama sekali.

Karakteristik pemilik lahan juga mempunyai peranan cukup besar bagi proses alih fungsi pemanfaatan lahan. Untuk lahan yang dimiliki oleh golongan masyarakat yang memiliki status ekonomi rendah akan mempunyai motivasi tinggi untuk menjual lahannya kepada masyarakat yang ekonominya kuat dalam hal ini akan mendorong terjadinya transaksi jual beli lahan. Pada gilirannya gejala tersebut akan berpengaruh pada proses alih fungsi pemanfaatan lahan. Demikian pula halnya dengan pandangan tentang proses kenaikan harga, bagi golongan yang mempunyai pandangan jauh ke depan akan jauh berbeda pula. Daerah-daerah yang memiliki fasilitas umum yang lengkap akan mendorong terjadinya proses alih fungsi pemanfaatan lahan daripada daerah yang memiliki fasilitas umum terbatas.

Menurut Bintarto (1997) penyempitan lahan diakibatkan oleh adanya pembangunan pemukiman dan instansi lainnya yang akan menyebabkan terjadinya: 1) Lahan pertanian mengalami penyempitan luas segi dari penggunaannya; 2) Mengurangi tenaga kerja; 3) Meningkatnya urbanisasi; 4) Pendapatan petani berkurang (bagi yang berpenghasilan pertanian); 5) Meningkatnya pengangguran di desa.

Prakarsa sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia di suatu lahan tertentu mengakibatkan perubahan pemanfaatan lahan di suatu daerah. Pada daerah-daerah yang kemudian dipilih sebagai lokasi pembangunan kompleks pemukiman, akan sangat mempengaruhi proses perubahan pemanfaatan lahan.

Meningkatnya harga lahan merupakan gejala yang sangat umum terjadi di pedesaan yang memiliki potensi

sumber daya yang tinggi. Kenaikan harga dan biaya lahan merupakan dampak tidak langsung dari adanya sumberdaya yang dihasilkan oleh lahan tersebut, sehingga adanya proses alih fungsi penggunaan lahan itu. Salah satu faktor yang mengakibatkan penggunaan lahan adalah adanya sumberdaya yang dimiliki oleh lahan yang lebih dapat memenuhi kebutuhan manusia ke arah yang lebih baik.

Bagi negara Indonesia masalah yang sifatnya umum adalah mengenai kependudukan, penambahan penduduk tinggi juga terkait dengan jenis pekerjaan mempengaruhi kemampuan penduduk dalam menggunakan lahan, karena jenis pekerjaan yang baik akan menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Dan dengan pendapatan yang baik akan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan lahan. Hal ini dapat dilihat dari perluasan pemukiman baru dan jasa yang semuanya membutuhkan lahan untuk pembangunan dan pengembangan serta pengambilan wilayah disekitarnya. Penggunaan lahan sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia, semakin besar aktivitas manusia akan semakin banyak lahan yang digunakan.

Yang menjadi rumusan dalam pembahasan penelitian ini menyangkut Karakteristik Desa Bandar Klippa yang di fokuskan kepada Karakteristik Desa berdasarkan kepada perubahan penggunaan lahan, sarana dan prasarana desa serta aktivitas masyarakat di Desa Bandar Klippa setelah terjadinya perubahan penggunaan lahan dari tahun 2005-2010.

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Desa Bandar Klippa selama periode 2005-2010 mengalami perubahan, yaitu perubahan yang terjadi terhadap luas lahan dan bentuk kenampakan fisik dari Desa Bandar Klippa itu sendiri. Perubahan luas lahan yang terjadi pada Desa Bandar Klippa yaitu luas lahan pemukiman dari periode 2005-2010 yang mengalami penambahan luas yaitu seluas 12,27 Ha (10,65%) dimana luas lahan pemukiman di

tahun 2005 seluas 115,23 Ha dan mengalami perluasan lahan ditahun 2010 seluas 127,5 ditahun 2010, sedangkan untuk wilayah persawahan juga mengalami perubahan lahan seluas 12,27Ha (2,09%) sama seperti luas lahan pemukiman dengan perhitungan luas persawahan di tahun 2005 yang mencapai 587,27 Ha kemudian mengalami penyempitan lahan di tahun 2010 hingga mencapai luas 575 Ha, pada lahan perkantoran juga mengalami perluasan lahan sejumlah 0,16 Ha (0,08%) dengan luas lahan perkantoran di tahun 2005 mencapai luas 1,34 Ha dan mengalami perluasan lahan ditahun 2010 mencapai 1,5 Ha, kemudian perubahan lainnya yang terjadi di Desa Bandar Klippa yaitu lahan prasarana umum lainnya dengan perubahan berupa penyempitan lahan mencapai 0,16 Ha (6,01%) dengan bentuk perubahan di lahan tahun 2005 sejumlah 2,66 Ha dan perluasan lahan yang mencapai 3,5 Ha di tahun 2010, sedangkan bentuk lahan yang tidak mengalami perubahan terdapat pada luas lahan perkebunan baik di tahun 2005-2010 relatif tetap yaitu seluas 1000 Ha dan lahan perkuburan dengan luas lahan yang juga relatif tetap pula dengan jumlah luas 4,5 Ha di tahun 2005-2010 dan total luas lahan secara keseluruhan lahan baik di tahun 2005 maupun di tahun 2010 seluas 1648,5 Ha.

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Desa Bandar Klippa mengakibatkan berbagai perubahan yang terjadi pada fisik desa maupun non fisik desa. Adapun fisik desa yang tampak dengan jelas terjadi pada lahan persawahan yang berubah menjadi lahan pemukiman, akibat berubahnya lahan pemukiman yang ada di sekitar ruas jalan besar antar desa dimana pemukiman yang terletak di pinggir jalan besar Desa Bandar Klippa juga mengalami perubahan yaitu pemukiman penduduk yang ada di tahun 2005 kini sebahagian besar telah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan, perkantoran dan jasa. Bersamaan dengan berubahnya lahan pemukiman tersebut maka mengubah karakter dari masyarakat

yang ada di Desa Bandar Klippa terutama pada mata pencaharian masyarakat yang beralih menjadi buruh cuci, kuli bangunan, pedagang, penjaga toko, jasa, pegawai kantor, dll.

Dengan berubahnya fisik dari Desa Bandar Klippa maka akan mengubah keadaan non fisik desa tersebut, adapun keadaan non fisik dari Desa Bandar Klippa yang berubah ialah mata pencaharian masyarakat, adat istiadat, kelembagaan, pendidikan dan keterampilan masyarakatnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebahagian besar masyarakat Desa Bandar Klippa bermata pencaharian sebagai buruh tani dengan jumlah 1853 jiwa atau ditahun 2005 dan mengalami pengurangan sejumlah 24 jiwa (1,29%) sehingga di tahun 2010 jumlah jiwa masyarakatnya mencapai 1829 jiwa, disusul oleh petani sejumlah 1625 jiwa ditahun 2005 dan juga mengalami pengurangan sebesar 5 jiwa (0,31%) sehingga jumlah masyarakatnya menjadi 1620 jiwa di tahun 2010, kemudian disusul oleh karyawan swasta sejumlah 352 jiwa ditahun 2005 dan mengalami penambahan sebesar 55 jiwa (15,63%) dengan jumlah yang dicapai sebesar 407 jiwa di tahun 2010, pegawai negeri sipil sejumlah 32 jiwa ditahun 2005 dan mengalami penambahan hingga mencapai 4 jiwa (12,5%) dengan demikian jumlah masyarakat mencapai 36 jiwa di tahun 2010, sedangkan sebahagian kecil dari masyarakat Desa Bandar Klippa bermata pencaharian sebagai pengrajin industri rumah tangga, peternak, yang tidak mengalami perubahan baik di tahun 2005 hingga tahun 2010. begitu pula dengan TNI, POLRI, Pensiunan POLRI/TNI/PNS, serta Arsitektur yang juga tidak mengalami perubahan baik di tahun 2005 dan 2010. Hal ini di dukung oleh keadaan fisik wilayah Desa Bandar Klippa seperti, topografi yang relatif datar, dan iklim yang sangat cocok sebagai lahan pertanian maupun perkebunan. Ditambah dengan penjelasan dari masyarakat Desa Bandar Klippa yang menjelaskan bahwa desa tersebut memiliki tanah yang subur

sehingga baik untuk di lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Namun bukan hanya itu saja perubahan penggunaan lahan di beberapa wilayah Desa Bandar Klippa juga telah mampu mengubah karakter masyarakatnya sehingga tidak jarang masyarakat di desa tersebut melakukan pengalihan pada mata pencaharian di tahun 2010 sebagai pedagang, buruh cuci, kuli bangunan, maupun penjaga toko serta pegawai swasta maupun pegawai negeri, sehingga mereka dapat mempertahankan hidupnya pasca pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, dan lain-lain.

Adat adalah kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk perayaan yang di dalamnya terdapat aturan atau norma-norma sebagai tanda kehormatan dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur maupun sedih terhadap apa yang dirasakan. Dengan adanya perubahan zaman saat ini banyak masyarakat Indonesia tidak lagi mementingkan adanya adat istiadat termasuk di desa-desa juga sudah banyak upacara adat yang terlupakan begitu pula dengan masyarakat yang ada di Desa Bandar Klippa hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah adat istiadat yang masih dilakukan di Desa Bandar Klippa hanya ada 4 upacara, adapun adat istiadat yang masih digunakan oleh masyarakat Desa Bandar Klippa berupa musyawarah adat contohnya musyawarah dalam pelaksanaan (a) gotong royong dan, (b) musyawarah kegiatan desa lainnya di desa. Selain itu ada pula upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara adat dalam penyelesaian masalah / konflik.

Dari hasil penelitian terhadap kelembagaan yang ada di Desa Bandar Klippa menunjukkan bahwa ada 4 jenis kelembagaan yang ada yaitu (1). Lembaga keuangan, (2). Lembaga keagamaan, (3). Lembaga pendidikan, (4). Lembaga sosial, (5). Lembaga kesehatan, (6). Lembaga pemerintahan, (7). Lembaga gotong royong.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Desa Bandar Klippa telah mengalami perkembangan dan memiliki pemikiran yang maju untuk mengembangkan desa tersebut. Dimana dengan semakin banyaknya lembaga yang ada di desa, berarti akan semakin banyak kepedulian dan perhatian masyarakat akan desa tersebut akan desa itu hal tersebut di akibatkan oleh adanya lembaga yang mengatur dan membina masyarakat untuk lebih maju.

Pendidikan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin tinggi pendidikan penduduk, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dan perkembangan di desa tersebut.

Prasarana pendidikan yang terbesar yang ada di wilayah Desa Bandar Klippa berupa gedung SD sejumlah 6 unit di tahun 2005 dan di tahun 2010 dan tidak mengalami perubahan dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan unit gedung yang ada di desa tersebut, demikian pula dengan gedung TK sejumlah 4 unit dengan di tahun 2005 dan ditahun 2010, gedung Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan jumlah 3 unit di tahun 2005 yang kemudian mengalami penambahan sebesar 1 unit (33,33%) di tahun 2010 menjadi 4 unit di tahun 2010. Gedung pendidikan agama dan gedung perpustakaan daerah tidak mengalami penambahan masih tetap sejumlah 1 unit baik di tahun 2005-2010 dengan tingkat di tahun 2005 dan di tahun 2010, dan gedung akademi perguruan tinggi yang masih baru di bangun di tahun 2010 sejumlah 1 unit dengan persentase mencapai (100%) karena bangunan ini masih sangat baru dibangun dan merupakan bangunan akademi pertamayang diharapkan dapat dikembangkan kembali di tahun-tahun yang akan datang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pendidikan masyarakatnya mencapai yaitu tingkat TK : 327 jiwa (8,92%) tingkat SD : 172 jiwa (4,69%) tingkat SMP : 1405(38,33%) tingkat SMA : 1730 jiwa (47,2%) tingkat D-3 : 11 jiwa

(0,3%) tingkat S-1 : 18 jiwa (0,49%) tingkat S-2 : 2 jiwa (0,05%)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan yang paling besar ada di Desa Bandar Klippa ada pada tingkat SMA kemudian dilanjutkan dengan tingkat SMP sedangkan tingkat pendidikan yang terkecil yang ada di Desa Bandar Klippa ada pada tingkat D-2, S-1, dan S-2 dari hasil pengamatan dapat di ketahui bahwa pendidikan di desa ini cukup tinggi. Hal ini disebabkan perubahan lahan yang mengarah pada kemajuan tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Bandar Klippa.

Ketersediaan sarana dan prasarana desa sangat erat hubungannya dengan aktivitas masyarakat. Dengan adanya perubahan lahan yang terjadi di desa Bandar Klippa akan mampu membantu dalam peningkatan mobilitas penduduk dan kualitas hidup masyarakat di Desa Bandar Klippa, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan mempermudah penduduk dalam melakukan aktivitasnya baik di dalam desa, antar desa maupun dari desa ke kota.

Desa Bandar Klippa memiliki 1 jenis perhubungan hal ini di sebabkan Desa Bandar Klippa memiliki jalan yang sudah di aspal hampir di keseluruhan ruas jalan baik jalan antar dusun, jalan antar desa, maupun jalan desa menuju kota yang sudah di aspal dengan menggunakan aspal yang baik. Sehingga proses perhubungan Desa Bandar Klippa dengan desa lainnya berjalan dengan lancar dan proses pemasaran juga dapat terlaksana dengan maksimal sehingga perkembangan desa dapat maju dengan pesat, sedangkan untuk prasarana jalan yang belum di aspal atau masih menggunakan batu kerikil untuk memperkeras jalan hanya terdapat paada jalan di sekitar gang rumah penduduk yang relatif kecil. Selain itu transportasi sebagai sarana pelengkap bagi kelancaran di setiap kegiatan masyarakat desa juga cukup baik.

Alat transportasi yang paling mendominasi di Desa Bandar Klippa yaitu : angkutan umum per-desa dengan jumlah

pencapaian jumlah 27 kendaraan ditahun 2005 dan mengalami penambahan sebesar 6 unit (28,57%) sehingga mencapai 23 unit kendaraan di tahun 2010, kemudian di susul oleh bus umum dengan jumlah 18 unit di tahun 2005 dan mengalami penambahan sejumlah 5 unit (27,78%) sehingga mencapai 23 unit ditahun 2010, kemudian pada peringkat ketiga jenis kendaraan umum becak yang mencapai 17 Unit di tahun 2005 yang juga mengalami penambahan per-unitnya sejumlah 2 unit (11,76%) menjadi 19 unit di tahun 2010, lalu truck umum yang mencapai 11 unit di tahun 2005 kemudian mengalami pengurangan unit sejumlah 3 unit (27,27%) menjadi 8 unit di tahun 2010, serta unit terkecil yaitu ojek dengan jumlah 9 unit di tahun 2005 dan mengalami penambahan sebanyak 5 unit (55,56%) menjadi 14 unit di tahun 2010.

Prasarana produksi yang ada di Desa Bandar Klippa adalah pada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, dimana desa ini tidak memiliki saluran irigasi dan pemberian pupuk serta obat-obatan yang menjadikan tanaman lebih bagus dan memiliki produksi yang lebih memuaskan, baik pada pertanian maupun perkebunan, untuk perkebunan yang ada di Desa Bandar Klippa terletak pada dusun karang yang juga merupakan daerah lalu lintas antar desa maupun dari desa ke kota, sehingga dapat terlihat dengan jelas bentuk perkebunan kelapa sawit yang masih merupakan milik PTPN 2, sedangkan pada peternakan Desa Bandar Klippa juga memiliki pengelolaan ternak yang cukup baik terlihat dari kandang dan proses pemberian makanan terhadap hewan yang di ternakan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat terlihat bahwa pada dusun jambe di gunakan oleh masyarakat untuk peternakan khususnya peternakan lembu, sehingga peternakan yang ada di Desa Bandar Klippa lebih tertata Dengan baik

Masyarakat Desa Bandar Klippa memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan mereka ke beberapa daerah. Ada yang memasarkan

langsung ke agen/ pengusaha yang langsung datang ke Desa Bandar Klippa ataupun dibawa keluar daerah, serta ada pula yang memasarkannya di dalam Desa Bandar Klippa itu sendiri. Dengan demikian Desa Bandar Klippa memiliki 2 jenis pemasaran yaitu : 1. Pasar umum, 2. Toko/warung. Pasar umum yang ada di Desa Bandar Klippa terdiri atas pasar tradisional dan pasar modern. Pasar umum yang terdapat pada Desa Bandar Klippa terfokus pada area jalan lintas atau tepatnya terletak pada dusun karang yang di jadikan sebagai pusat perekonomian bagi Desa Bandar Klippa, dengan kebijakan pemerintah setempat untuk mengalih fungsikan lahan pemukiman masyarakat menjadi pusat perbelanjaan baik pasar tradisional maupun pasar modern, hal ini di sebabkan wilayah Dusun Karang merupakan wilayah yang sangat strategis untuk dikembangkan karena dapat di capai oleh setiap dusun maupun wilayah desa disekitar Desa Bandar Klippa. Sehingga masyarakat pada dusun ini lebih memperlihatkan corak kota yang cukup kental dari pada corak pedesaan.

Desa Bandar Klippa memiliki 5 jenis prasarana sosial yaitu : 1. Gedung pemerintahan desa, 2. Gedung sekolah, 3. Gedung peribadatan , 4. Gedung kesehatan, 5. Prasarana Olah Raga.

Prasarana kesehatan yang terbesar adalah posyandu dengan jumlah 20 unit ditahun 2005 dan di tahun 2010 yang tersebar di setiap dusunnya, namun pada prasarana ini tidak mengalami perubahan. Kemudian di lanjutkan oleh apotik dengan jumlah 3 unit di tahun 2005 kemudian mengalami penambahan sejumlah 1 unit (33,33%) menjadi 4 unit di tahun 2010, setelah itu toko obat yang tidak mengalami perubahan sama seperti Posyandu sehingga jumlah tetap yaitu sejumlah 2 unit ditahun 2005 ditahun 2010, sedangkan untuk unit lainnya seperti rumah sakit umum, puskesmas pembantu, dan rumah bersalin dengan sejumlah 1 unit tanpa mengalami perubahan apapun

baik pertambahan maupun pengurangan unit-nya di tahun 2006 dan di tahun 2010.

Hal ini berarti Desa Bandar Klippa telah mengalami kemajuan dimana lambat laun prasarana sosial yang ada di desa ini akan semakin bertambah dan hampir lengkap untuk sebuah desa, dimana indikator kelengkapan prasarana sosial yang ada di desa cukup lengkap dengan jumlah kelengkapan sebanyak 5 jenis prasarana sosial.

Pembahasan ini meliputi Perubahan karakteristik desa berdasarkan: a) penggunaan lahan, b) pertambahan sarana dan prasarana desa, c) aktifitas masyarakat desa akibat perubahan karakteristik desa.

Perubahan penggunaan lahan di desa dapat mempengaruhi aktivitas masyarakatnya di segala bidang, dimana dengan berubahnya fungsi lahan maka akan mengubah struktur perekonomian bagi desa tersebut, sebab dengan perubahan lahan tersebut masyarakat mau tidak mau akan memaksa masyarakat desa untuk beralih mata pencaharian, demikian pula dengan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Desa Bandar Klippa dimana dapat kita ketahui bahwa penyempitan lahan pertanian sebesar 12,27 Ha (2,09%) yang terjadi di Desa Bandar Klippa mengakibatkan banyaknya buruh tani yang beralih mata pencaharian menjadi buruh cuci maupun perkerja bangunan, serta pedangang kecil-kecilan (Hasil Daftar Wawancara Masyarakat), Berbeda dengan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman, pada lahan pemukiman sebesar 115,23 Ha yang berada di sepanjang jalan besar desa yang menghubungkan antar desa maupun desa dengan kota yang kemudian beralih fungsi sebesar 0,16 Ha (6,01%) menjadi lahan jasa, perkantoran, maupun perdagangan. Namun sangat di sayangkan pembangunan yang terjadi di desa tersebut bukan di karenakan oleh masyarakat setempat tetapi di akibatkan oleh masuknya para imigran di desa tersebut maupun penanam modal dari kota, sehingga hal tersebut belum terlalu memberikan dampak perubahan

ekonomi yang cukup meningkat bagi para penduduk setempat namun memberikan penambahan pemasukan bagi pemerintah desa untuk dapat lebih memajukan desa itu sendiri sehingga mampu meningkatkan kehidupan masyarakatnya dimasa yang akan datang. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa Desa Bandar Klippa telah mengalami pertumbuhan pembangunan yang sangat baik, sehingga di tahun 2010 Desa Bandar Klippa tidak tampak seperti desa, hal ini disebabkan oleh Desa Bandar Klippa yang telah mengalami pembangunan yang cukup pesat sehingga terlihat seperti desa yang mencirikan ciri kota. Adapun wilayah di Desa Bandar Klippa yang mengalami perubahan fisik bangunan dan sosial masyarakat sehingga terlihat mencirikan kota ialah wilayah di Dusun Karang, Dusun Kelapa I, Dusun Kelapa II dimana desa ini berada di sekitar jalan besar (antar desa dan kota) dengan kehidupan masyarakatnya yang juga mengalami perubahan dalam aktivitas sehari-hari dari buruh tani, petani menjadi pedagang, dan kegiatan lain di bidang jasa pelayanan desa, sedangkan untuk wilayah yang masih memberikan ciri pedesaan yang kental ialah Dusun Sengon, Dusun Lamtoro II, sedangkan untuk wilayah Dusun Lomtaro I merupakan dusun yang baru berkembang dengan masyarakat yang kebanyakan merupakan warga imigran dari dusun lainnya, kebanyakan masyarakat di desa tersebut bermata pencaharian sebagai buruh bangunan, buruh cuci, buruh kebun dan lain-lain

Ketersediaan sarana dan prasarana desa sangat erat kaitannya dengan aktivitas penduduk. Tersedianya sarana dan prasarana akan mempermudah penduduk dalam melakukan aktivitasnya baik di dalam desa, antar desa, maupun dari desa kota.

Desa Bandar Klippa memiliki 3 jenis perhubungan/jalan desa yaitu : 1) jalan aspal yang berada disepanjang jalan dusun 1 sampai dengan dusun 20, 2) jalan batu yang di perkeras hanya ada pada jalan kecil (Gang) desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Desa Bandar Klippa

memiliki Prasarana jalan yang sangat baik sehingga dapat mempermudah setiap aktivitas masyarakatnya.

Prasarana Produksi yang ada di Desa Bandar Klippa adalah pada bidang Pertanian dan Perkebunan, dimana desa ini tidak memiliki saluran irigasi untuk bidang pertanian namun dilakukan pemeliharaan tanaman dengan baik seperti pemberian pupuk dan obat-obatan yang menjadikan tanaman lebih bagus dan memiliki produksi yang memuaskan demikian juga dengan perkebunannya dalam hal ini merupakan perkebunan milik pemerintah yaitu PTPN 2 dengan luas 1000 Ha yang memproduksi kelapa sawit sebagai komoditi unggulan di desa tersebut. Untuk Perkebunan PTPN 2 sendiri dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan baik perubahan Luas ataupun komoditi yang dihasilkan, hal ini disebabkan perkebunan PTPN 2 yang berada diantara Pemukiman penduduk dan merupakan milik pemerintah sehingga tidak pernah mengalami perubahan luas area perkebunan.

Di tahun 2010 Masyarakat Desa Bandar Klippa memasarkan hasil produksi mereka di dalam desa hingga ke berbagai tempat. Ada yang memasarkan langsung ke agen / pengusaha yang datang langsung ke desa tersebut atau dibawa keluar desa dan ada pula yang memasarkannya hanya di desa itu sendiri yaitu ke kios-kios dan warung. Dengan demikian Desa Bandar Klippa memiliki 2 jenis pemasaran yaitu : 1) pasar umum yang terdiri atas pasar tradisional dan pasar modern di tahun 2010, 2) warung / kios-kios. Untuk pasar umum dan pasar tradisional yang ada di Desa Bandar Klippa sendiri berada di sekitar ruas jalan besar di Dusun Karang dan Dusun kelapa I dan II. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan wilayah yang cukup strategis dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan perekonomian dan perkembangan di bidang pembangunan fisik desa, sedangkan untuk kios dan

warung tersebar di seluruh dusun di Desa Bandar Klippa.

Di Tahun 2010 Desa Bandar Klippa memiliki yaitu : 1. Gedung pemerintahan desa berupa gedung dala desa yang berada di di Dusun Karang, 2. Gedung sekolah (untuk bangunan pendidikan berada di Dusun Karang, Dusun kelapa I dan II, Dusun Jambe, dan Dusun Lamtoro II) mengalami peningkatan jumlah sebanyak 1 unit (33,33%) terhitung sejak tahun 2005-2010 untuk gedung Tempat Penitipan Anak (TPA) dan pembangunan sebuah Akademi Perguruan Tinggi Kebidanan di tahun 2010 sejumlah 1 unit (100%) terhitung sejak tahun 2005-2010, 3. Gedung peribadatan (berada di di Dusun Karang, Dusun Jambe, Dusun Lamtoro I dan II, Dusun Sengon, dan Dusun Kelapa) , 4. Gedung kesehatan (tersebar di 20 Dusun di Desa Bandar Klippa) dengan Perubahan jumlah sejak tahun 2005-2010 sejumlah : 1 unit (100%) pembangunan poliklinik di awal tahun 2010 dan Pertambahan jumlah apotik di tahun 2010 sebanyak 1 unit (33,33) terhitung sejak tahun 2005-2010 dan, 5. Prasarana Olah Raga (untuk prasarana olah raga hanya terdapat di Dusun Karang dan Dusun Kelapa) dengan perubahan jumlah sebesar 1 unit (100%) untuk lapangan tenis dan 1 unit (100%) untuk lapangan voli terhitung sejak tahun 2005-2010. Hal ini berarti Desa Bandar Klippa telah mengalami kemajuan dimana lambat laun prasarana sosial yang ada di desa ini semakin bertambah dan hampir lengkap untuk sebuah desa, dimana melalui indikator kelengkapan prasarana sosial yang ada di desa ada sebanyak 6 jenis. Dalam hal ini hanya 1 jenis Prasarana sosial yang belum ada yaitu Gedung Swadaya.

Aktivitas masyarakat pada umumnya dapat berjalan apabila kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung setiap aktivitasnya telah terpenuhi, demikian halnya dengan Desa Bandar Klippa yang telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup baik sehingga mampu mendukung setiap aktivitas masyarakat di desa tersebut.

Perubahan lahan yang terjadi di Desa Bandar Klippa sendiri telah mengubah aktivitas masyarakat yang ada di desa tersebut, hal ini dapat terlihat dari berubahnya jenis mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar desa, seperti para buruh perkebunan yang mengalami pengurangan jumlah di tahun 2010 sebanyak 24 jiwa (1,29%) dan Pertanian yang juga mengalami pengurangan jumlah jiwa sebanyak 5 jiwa (0,31%) di tahun 2010 yang berada di dusun Karang, Dusun Sengon, Dusun Kelapa I dan II hal tersebut disebabkan masyarakat tersebut tinggal sekitar area perkebunan yang pada akhirnya akibat adanya perubahan penggunaan lahan memilih untuk beralih mata pencaharian menjadi pedagang baik dengan membuka warung, pegawai toko, pekerja bangunan (kuli bangunan) maupun dengan berjualan kaki lima di tahun 2010. Sedangkan bagi para pemilik lahan pertanian beralih mata pencaharian dengan membuka toko-toko elektronik, toko baju, maupun toko lainnya. Sedangkan untuk dusun Lamtoro I dan II pada umumnya masyarakatnya bertani di tahun 2005 dikarenakan lahan pertanian mereka di alih fungsikan untuk wilayah pemukiman maka di tahun 2010 pendudukpun beralih mata pencaharian sebagai pedagang, buruh cuci dan pekerja bangunan.

Untuk aktivitas peribadatan sendiri juga telah mengalami banyak pengembangan hal ini terlihat dari perubahan sarana dan prasarana peribadatan dibidang renovasi tempat ibadah, kemudian sarana transportasi yang bertambah sebesar 5 unit bus umum (27,78%), angkutan per-desa yang bertambah 6 unit (28,57%), ojek bertambah 5 unit (55,56%) dan becak yang juga bertambah sebanyak 2 unit (11,76%) akan memperlancar aktivitas masyarakat di desa tersebut untuk dapat melakukan interaksi didalam desa, antar desa, dan desa dengan kota. Sehingga masyarakat di Desa Bandar Klippa tidak mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas.

SIMPULAN

Perubahan karakteristik desa terkait perubahan bentuk penggunaan lahan di Desa Bandar Klippa terdiri atas luas dan bentuk dimana perubahan lahan tersebut mengakibatkan berubahnya aktifitas masyarakatnya terutama untuk aktifitas mata pencaharian, Sehingga dapat di ketahui bahwa Desa Bandar Klippa mengalami Pertumbuhan fisik desa yang mengarah pada pertumbuhan yang positif.

Dilihat dari sarana dan prasarana Desa Bandar Klippa termasuk pada desa berkembang yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dengan memiliki 5 jenis prasarana sosial yaitu : 1. Gedung pemerintahan desa, 2. Gedung sekolah, 3. Gedung peribadatan, 4. Gedung kesehatan. Dimana perubahan prasarana dan sarana tersebut di pengaruhi oleh perubahan bentuk penggunaan lahan sehingga pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dilihat dari aktivitas masyarakatnya yang di akibatkan oleh perubahan bentuk penggunaan lahan yang terjadi di Desa Bandar Klippa yang menyebabkan berubahnya karakter masyarakat desa, baik di lihat melalui perubahan kualitas hidup masyarakatnya seperti pada bidang mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahannya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Hagul, Peter. (1992). *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali

Irmayanti (2004). *Study Tentang Perkembangan Desa Kuala Landah Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan*. Skripsi. FIS, UNIMED.Medan

Lubis. S., (2012), Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-Undang RI NO. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 52-66

Rahardjo, Adisasmita. (2006). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rinaldi, R., (2012), Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 22- 34

Rizal, M.F., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 112-129

Rosmaniar P., (2012), Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 1-2

Sajogyo, Putjiwati. (1983). *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Yogyakarta: UGM Press

Sirait, R.S.M.P., (2011), Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Pada Dinas Kependudukan Kota Medan), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 232-249

Siregar, H., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 51-64

Sudarto, (2011), analisis kompetensi dan kinerja aparatur pada Dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten karo, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 102-111

Sugiharto. (2006). *Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah*. Medan: USU Press

Suhandoyo, DKK. (2002). *Pengembangan Wilayah Pedesaan Dan Kawasan Tertentu: Sebuah Kajian Eksploratif*. Jakarta: Direktorat Kebijakan Teknologi Dan Pengembangan Wilayah

Wahyudin, Sumpeno. (2004). *Perencanaan Desa Terpadu*. Jakarta: CRS Indonesia

<http://rahmatkusnadi6.blogspot.com/2010/05/klasifikasi-desa.html>. Minggu 30 Mei 2010